

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. PAD ( $X_1$ ) dari inferensialnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal ( $Z$ ) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT, semakin tinggi PAD yang dihasilkan maka semakin memungkinkan daerah mampu memenuhi belanjanya sendiri terkhususnya belanja modal.
2. DBH ( $X_2$ ) dari inferensialnya tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal ( $Z$ ) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT, semakin tinggi DBH tidak mempengaruhi meningkatnya Belanja Modal.
3. DAU ( $X_3$ ) dari inferensialnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal ( $Z$ ) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT, meningkatnya DAU akan meningkatkan Belanja Modal karena DAU yang digunakan untuk pembangunan di daerah.
4. DAK ( $X_4$ ) dari inferensialnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal ( $Z$ ) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT, semakin tinggi DAK yang dialokasikan kepada daerah digunakan daerah untuk belanja modal sehingga belanja modal pun mengalami peningkatan.
5. Belanja Modal ( $Z$ ) dari inferensialnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM ( $Y$ ) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT, semakin

tinggi belanja modal maka akan meningkatkan IPM karena belanja modal tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan manusia demi tercapainya kesejahteraan.

6. PAD ( $X_1$ ) dari inferensialnya tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM ( $Y$ ), semakin tinggi PAD yang dihasilkan daerah tidak meningkatkan IPM.
7. DBH ( $X_2$ ) dari inferensialnya tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM ( $Y$ ), meningkatnya DBH tidak mempengaruhi peningkatan IPM.
8. DAU ( $X_3$ ) dari inferensialnya tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM ( $Y$ ), meningkatnya DAU tidak mempengaruhi peningkatan IPM.
9. DAK ( $X_4$ ) dari inferensialnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM ( $Y$ ), semakin tinggi DAK akan mempengaruhi peningkatan IPM karena DAK dialokasikan untuk peningkatan kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
10. Pengaruh tidak langsung PAD ( $X_1$ ) terhadap IPM melalui Belanja Modal ( $Z$ ) dari inferensialnya PAD tidak berpengaruh positif terhadap IPM melalui Belanja Modal, pengalokasian PAD melalui belanja modal tidak meningkatkan IPM karena belanja modal memiliki pengaruh langsung terhadap IPM. Belanja modal bertujuan untuk pembangunan maka pengaruh secara langsung terhadap IPM lebih tinggi.
11. Pengaruh tidak langsung DBH ( $X_2$ ) terhadap IPM melalui Belanja Modal dari inferensialnya DBH berpengaruh positif terhadap IPM melalui Belanja

Modal, pengalokasian DBH melalui belanja modal akan meningkatkan IPM.

12. Pengaruh tidak langsung DAU ( $X_3$ ) terhadap IPM melalui Belanja Modal dari inferensialnya DAU tidak berpengaruh positif terhadap IPM melalui Belanja Modal, DBH yang dialokasikan melalui belanja modal tidak meningkatkan IPM karena belanja modal memiliki pengaruh langsung terhadap IPM. Belanja modal bertujuan untuk pembangunan maka pengaruh secara langsung terhadap IPM lebih tinggi.
13. Pengaruh tidak langsung DAK ( $X_4$ ) terhadap IPM melalui Belanja Modal dari inferensialnya DAK tidak berpengaruh positif terhadap IPM melalui Belanja Modal, DAK yang dialokasikan melalui belanja modal tidak meningkatkan IPM karena belanja modal memiliki pengaruh langsung terhadap IPM. Belanja modal bertujuan untuk pembangunan maka pengaruh secara langsung terhadap IPM lebih tinggi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut saran yang dapat diberikan untuk berbagai pihak:

- a) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT
  1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu Pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah peningkatan layanan publik berupa kesehatan, pendidikan dan ekonomi sehingga kualitas pembangunan manusianya meningkat.

2. IPM Provinsi NTT berada pada kategori sedang, Kota Kupang berada pada kategori tinggi sedangkan terdapat 5 Kabupaten yang berada pada kategori rendah yaitu Kabupaten Sabu Raijua, Malaka, Sumba Tengah, Manggarai Timur dan Alor. Hal ini dapat menunjukkan bahwa ada ketimpangan pembangunan, Pemerintah diharapkan agar lebih memperhatikan kebutuhan di daerah seperti Air bersih, Transportasi, Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan dan Perawat), Rumah sakit, Pendidikan (Guru, Gedung sekolah, Buku, Fasilitas Pendidikan, Mutu Pendidikan). Diharapkan agar pembangunan setiap daerah benar-benar merata dan tidak ada lagi daerah prioritas atau daerah bukan prioritas, dan tidak ada lagi daerah tertinggal atau daerah yang maju karena 21 Kabupaten dan 1 Kota merupakan bagian Provinsi NTT.
3. Diharapkan dapat meningkatkan lagi PAD dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial, lebih meningkatkan penerimaan daerah dengan menghitung potensi PAD yang riil yang dimiliki daerah;
4. Daerah memiliki pendapatan DBH walaupun jumlah pendapatannya kecil dibandingkan sumber pendapatan lainnya, namun diharapkan agar daerah dapat lebih memperhatikan potensi pendapatan dan meningkatkan upaya pemanfaatan dan pengelolaan baik dalam sektor pajak maupun sumber daya alam guna peningkatan DBH.
5. DAU yang dialokasikan kepada pemerintah daerah agar dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran agar dapat benar-benar bermanfaat bagi

pembangunan daerah sehingga dapat berdampak pada pembangunan manusia yang unggul.

6. Pemerintah daerah diharapkan agar mengalokasikan DAK lebih efektif dan diutamakan untuk kepentingan publik. Dengan demikian, dapat membantu berkembangnya perekonomian di daerah sehingga berdampak pada pembangunan manusia.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT agar lebih meningkatkan pelayanan publik dalam bentuk Belanja Modal yang merupakan salah satu sarana penunjang dan juga merupakan stimulus yang akan berpengaruh terhadap pembangunan.
8. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis, dengan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi perkembangan IPM seperti Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau variabel lainnya karena diduga dapat memberikan hasil yang berbeda. Hal itu di sebabkan oleh kenyataan bahwa setiap sumber penerimaan daerah memiliki sensitivitas yang berbeda-beda terhadap faktor uji, sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolok ukur dan tambahan referensi dalam penelitian berikutnya dengan menambah periode penelitian, misalnya sepuluh tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwas,Dos, M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*.Bandung:Alfabeta
- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi Daerah*.Yogyakarta:BPFE
- Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. 2017. *Index Pembangunan Manusia Metode Baru*. Kupang:Badan Pusat Statistik
- Baldaric Siregar.2015.*Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual)*. Yogyakarta : STIM YKPN.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta:BPFE
- Budiriyanto, E. 2011.*Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Formulasi DAU*.Ditjen Perimbangan Keuangan,Kemenkeu RI.
- Erlina, dkk. 2015.*Akuntansi Keuangan Daerah Berbasisi Akrual*. Jakarta:Salemba Empat.
- Ferdinand, Augusty.2014.*Metode Penelitian Manajemen*.Semarang:BP Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrik*. Jakarta. Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2001. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN.
- \_\_\_\_\_.2002.*Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*.Jakarta:Salemba Empat
- \_\_\_\_\_.2007.*Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*.Edisi ketiga.Jakarta:Salemba Empat
- \_\_\_\_\_.2010. *Akuntansi Daerah Sektor Publik*.Jakarta : Salemba Empat
- \_\_\_\_\_.2012.*Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah:Pengelolaan Keuangan Daerah,Edisi ketiga*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN

- \_\_\_\_\_.2013.*Manajemen Keuangan Sektor Publik*.Yogyakarta:Salemba Empat
- Khusaini, M. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*.Malang:BPFE Unibraw
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta:Erlangga
- Mahmudi, 2010.*Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo, 2002.*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta:Andi
- \_\_\_\_\_, 2009.*Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Andi
- \_\_\_\_\_, 2018.*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Terbaru. Yogyakarta:Andi
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah*.Ghalia Indonesia
- Sugiyono,2017.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Waluyo, A.2007.*Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung:Mandar Maju
- World Bank. 2006. *Making the new Indonesia work for the poor*. Wangshinton D.C: World Bank
- UNDP.1995.*HumanDevelopment Report 1995*. New York:Oxford University Press
- \_\_\_\_\_.2015.*Human Development Report 2015*. New York:Oxford University Press
- \_\_\_\_\_.2017.*Human Development Report 2017*. New York:Oxford University Press

## **Jurnal**

- Amalia, F.R. dan Purbadharmaja, I.B.P. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol.3, No.6, Juni 2014
- Andayani, Sri. 2014. Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kualitas Pemerintah Dan Kinerja Ekonomi di Daerah Kabupaten. Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*. Malang
- Cok, I.K. Widani dan Adi Erawati. 2016. Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.17. 203-232
- Dartanto, Teguh dan Bambang P.S. Brojonegoro. 2003. Dampak Desentralisasi Fiskal di Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas antar Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan universitas Indonesia*. Vol.4, No.1. 17-38
- Fathimah, Purwaka dan Yohanes. 2016. Analisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumerdaya dan Lingkungan Universitas Jambi*. Vol 5. No.2
- Hastu, S. dan Zulfikar, Z. 2016. Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia Universitas Muhammadiyah*. Surakarta
- Juniawan dan Suryantini. 2018. Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2016. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 7, No. 3
- Mirza, Denni Sulistio .2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah



Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*. ISSN 2252-6560. 1-15

Lestari.P.2019.Analisis Pengaruh DAU, DAK dan DBH Terhadap IPM di Kabupaten/Kota Eks Karisedenan Kedu Tahun 2012-2016. *Journal Of Economic*. Vol.1.No.1

Putu Ayu.K.D dan I Ketut .S. 2015.Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali.*E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.Vol 4.No.1:1-70

Putu Gde.M.P dan I Gusti .K.A.Ulupui.2015.Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 11.3.ISSN:2302-8556

Ranis,G.,Stewart,F. dan Ramirez,A. 2000. *Economic Growth and Human Development*. World Development. 28:197-219

Raviyanti, Rahayu dan Mahardika.2017.Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua.*Jurnal Manajemen Universitas Telkom*.Vol XXII.No 02.243-256

Riva U.Harahap.2011.Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.*Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.Vol 11.1

Sangkoro, Hastu dan Zulfikar. 2016. Pengaruh DAK dan PAD Terhadap IPM (Studi empiris pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Taun 2012-2014). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol.1 (1)

Sari dan Supadmi. 2016.Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.Vol.15.3ISSN:2302-8556

- Setiawan dan Budiana. 2015. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol 4 [10] : 1276-1303. ISSN: 2303-0178
- Setyowati,L.,dan Yohana, K.S. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi empiris Kabupaten dan Kota Se-Jawa Tengah). *Jurnal STIE Bank BPD Jateng*. Vol.9, No.1, ISSN: 1411-1497
- Siswadi,dkk.2015.Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB. *Jurnal Assets Universitas Mataram*, Vol. 5, No. 2: 1-12
- Supriyitno (2015).Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,PAD,DAU terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa. *Jurnal Riset dan Perpajakan Universitas Pancasila*. Vol. 2, No. 1, hal 106 – 112
- Susanti dan Fahlevi (2016). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Syiah Kuala*. Vol,No.1.Hal 183-191
- Wandira, Arbie Gugus (2013) “Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia”. *Accounting Analysis Journal*, ISSN 2252-6765. 44- 51.
- Williantara dan Budiasih (2016) “Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap IPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013”.*E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*,ISSN 2302-8556.Vol.16.3
- Zul Fadhly (2018). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat”. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*. Vol.6.No.1

## **Thesis dan Disertasi**

Anggraini, T.2015. *Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia. Disertasi.* Surakarta. Universitas Sebelas Maret

Hariyanto, Tri Dedy. 2012. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jambi.*Tesis Program MPKP pada Universitas Indonesia: tidak diterbitkan

Harahap,Riva Ubar. 2010. *Pengaruh DAU, DAK dan DBH Terhadap IPM Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara.*Tesis. Sekolah Pascasarjana pada Universitas Sumatera Utara, Medan

Hayantowati, Heronimus. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT.* Tesis Magister Manajemen pada Universitas Katolik Widya Mandira: tidak diterbitkan

Henri,David,Ventje. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara.*Thesis.Universitas Sam Ratulangi

Kroon, Kornelius.2015. *Analisis Perbandingan Kemandirian Keuangan dan Keadaan Ekonomi Kabupaten Pemekaran dan Kabupaten Induk di Provinsi Nusa Tenggara Timur.* Tesis Magister Manajemen pada Universitas Katolik Widya Mandira: tidak diterbitkan

Leopold M.T.Dawu.2016.*Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Provinsi NTT.*Tesis Magister Manajemen pada Universitas Katolik Widya Mandira: tidak diterbitkan.

## **Peraturan**

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta: Dirjen PUOD

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang No 9 Tahun 2015*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 tahun 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

## **Website**

**<https://ntt.bps.go.id>**